



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : LEGISLATIF
LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **USMAN**
2. Jabatan : **KETUA DPRD**
3. NHK : **196306**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 9.600.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/182 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/180 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 344 m2/344 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
4. Tanah Seluas 2091 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah Seluas 191 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 156.400.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.400.000
3. MOBIL, TOYOTA G / CALYA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 128.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 995.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 988.018.377****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 11.739.418.377**



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

11.739.418.377

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.